



## Minta BPK Audit Ganti Rugi JK I

**PONTIANAK-RK.** Lambannya perbaikan tiang fender Jembatan Kapuas (JK) I menimbulkan kecurigaan kalangan DPRD Kota Pontianak. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Kalbar diminta untuk melakukan audit investigasi ganti rugi atas ditabraknya tiang JK I, guna memastikan tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh PT. Asria Nurlinda Inti Sejahtera (ANIS) selaku pelaksana kerja maupun pemerintah Kalbar selaku pengawas pelaksanaan kerja.

"Jangan sampai ada fitnah di masyarakat atas ganti rugi itu. Lebih baik diaudit saja. Biar semuanya terbuka. Jadi jika terjadi penyimpangan langsung ketahuan,"

■ Halaman 7

### Minta BPK .....dari halaman 1

ujar HM Fauzi SSos, anggota Komisi C DPRD Kota Pontianak, Sabtu (9/8).

Menurut Fauzi, seharusnya setiap ganti rugi diumumkan kepada masyarakat, melalui media cetak dan elektronik. Tetapi sampai saat ini, tidak diketahui sama sekali tentang biaya ganti rugi yang sudah diterima oleh pihak ketiga (PT. ANIS).

"Perlunya diketahui masyarakat, karena yang dirugikan adalah masyarakat. Jadi wajib masyarakat mengetahui berapa ganti rugi. Sudah sampai tahap mana pengerjaannya," jelasnya.

"Pasti masyarakat bertanya-tanya. Kenapa perbaikan tiang fender JK I baru sekarang dilakukan oleh PT. ANIS. Apa baru diganti

sekarang atau bagaimana?" sambungnya.

Perlunya wujud transparansi atas ganti rugi perbaikan tiang JK I serta perlunya dilakukan audit BPK RI Kalbar. "Karena perlu diketahui uang perbaikan Jembatan Kapuas I. Apakah dari APBN atau APBD atau uang dari ganti rugi itu sendiri, karena terkesan lamban perbaikannya," tegas Fauzi.

Jika berdasarkan hasil audit nantinya, ada temuan penyimpangan, maka aparat hukum baik Polda maupun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar bisa segera menindaklanjuti dengan dilakukan penyelidikan. Lantaran saat ini Masyarakat menganggap pemerintah tidak serius melakukan perbaikan JK I.

"Terbukti, hingga hari raya Idul Fitri kemarin, jembatan belum bisa difungsikan," kesal Fauzi.

Dikatakan Fauzi, keterlambatan perbaikan JK I, dan tidak transparansinya biaya ganti rugi dari perusahaan yang menabrak tiang jembatan, mulai Agustus 2013 hingga Maret 2014, bisa saja Polda dan Kejati melakukan penyelidikan. "Masalahnya saat ini Polda maupun Kejati ada keinginan atau tidak untuk menyelidiki. Hal tersebut sudah menyebabkan keresahan bagi pengguna jalan maupun masyarakat Kota Pontianak," ujarnya.

Laporan: Syamsul Arifin  
Editor: Hamka Saptono